

Turnitin Originality Report

Processed on: 25-Jan-2023 12:09 WIB

ID: 1998970251

Word Count: 3294

Submitted: 1

Similarity Index

64%

Similarity by Source

Internet Sources: 64%
Publications: 11%
Student Papers: 23%

Implementasi Program
Kampung Keluarga
Berencana Di Desa Grogol
Kecamatan Tulangan
Kabupaten Sidoarjo By Siti
Qonita Faiza

9% match (Internet from 26-Aug-2022)

<https://core.ac.uk/download>

</pdf/287229164.pdf>

6% match ()

[nursalim, nursalim. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR CIKATOMAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2017", 'Universitas Galuh Ciamis', 2018](#)

6% match (Internet from 07-Dec-2020)

<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/7934/6131>

6% match (Internet from 02-Oct-2022)

<http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/download/1050/317/>

5% match ()

[Hasniar, Hasniar, Muhammadiyah, Muhammadiyah, Parawangi, Anwar. "Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang", Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik \(KIMAP\), 2021](#)

5% match (Internet from 29-Oct-2022)

<http://lib.unnes.ac.id/34035/1/3312412051maria.pdf>

5% match (Internet from 16-Nov-2021)

<http://ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/641>

5% match (Internet from 18-Aug-2022)

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14671-Full_Text.pdf

4% match (student papers from 28-Jan-2020)

[Submitted to Universitas Islam Malang on 2020-01-28](#)

4% match (Internet from 18-May-2021)

<http://repository.ummat.ac.id/1988/>

4% match (Internet from 16-Jul-2019)

<https://www.scribd.com/document/373520703/32034707-Implementasi-kebijakan-publik-doc>

4% match (Internet from 01-Oct-2022)

<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/download/1282/1186/>

2% match (Internet from 09-Dec-2020)

<https://www.coursehero.com/file/58120253/2EP17977doc/>

Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Kampung KB serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Grogol. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap indikator didalam teori yaitu (1) komunikasi yang berupa undangan sosialisasi di balai desa dan pembekalan mengenai kampung keluarga berencana; (2) sumber daya manusia dengan jumlah anggota yang cukup banyak, fasilitas yaitu berupa tempat kegiatan dan juga tambahan buku binaan untuk para kader; (3) struktur birokrasi yaitu terdapat SOP yang mana menggunakan buku Kampung KB sebagai pedoman prosedur pelaksanaan Kampung KB; (4) disposisi/respon petugas menurut masyarakat para petugas sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya menjalankan program Kampung KB. Implementasi Kampung Keluarga Berencana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, yaitu tentang keluarga sejahtera. Kata Kunci: Kampung Keluarga Berencana, Kualitas Hidup Masyarakat Abstract This study aims to determine the implementation of the Family Planning Village program and to determine the inhibiting factors in the Implementation of the Family Planning Village Program in Grogol Village. Using qualitative methods with a descriptive approach. Data collection is done by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis uses three components, namely data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that each indicator in theory is (1) communication in the form of socialization invitations at the village hall and briefing on family planning villages; (2) human resources with a large number of members, facilities in the form of activity sites and additional training books for cadres; (3) the bureaucratic structure, namely there is an SOP which uses the KB Village book as a guideline for the procedures for implementing KB Village; (4) According to the community, the officers' disposition/response was good enough in carrying out their duties in carrying out the KB Village program. Implementation of Family Planning Villages based on Law of the Republic of Indonesia Number 52 of 2009, namely regarding prosperous families Keywords: Family Planning Village, Community Quality of Life PENDAHULUAN Kampung Keluarga Berencana adalah sebuah wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Konsep Kampung Keluarga Berencana adalah miniatur pelaksanaan program Keluarga Berencana secara terpadu dan komprehensif ditingkat lini lapangan (desa/kelurahan/dusun/RW). Konsep Kampung Keluarga Berencana merupakan konsep terpadu program Keluarga Berencana dengan program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Kampung Keluarga Berencana didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan program Keluarga Berencana. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari,

oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu sendiri. Kampung Keluarga Berencana diharapkan menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan dalam mewujudkan Agenda Prioritas 5 (lima) dari 9 agenda prioritas pemerintahan periode 2020-2021 yakni "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Secara umum, Kampung Keluarga Berencana ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup manusia ditingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Secara khusus, kampung Keluarga Berencana ini dibentuk selain meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non Kementrian dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait, juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan adalah salah satunya dengan pembentukan Kampung KB yang saat ini menjadi prioritas pemerintah dimana dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kampung KB bukan hanya untuk masalah kependudukan tapi juga dirancang melalui Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat diukur dari jumlah pengeluaran rumah tangga, apabila jumlah pengeluaran pokok rumah tangga sebanding atau lebih rendah dari pada pengeluaran yang bukan pokok rumah tangga. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Beberapa peneliti terdahulu telah menjelaskan tentang upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat antara lain: Pertama, Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Pada Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang (Wahyu Adi Pamungkas, 2020). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang berjalan baik dan memberikan dampak dan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat baik dalam aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi. Utamanya adalah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Adanya Kampung KB memberikan edukasi kepada masyarakat baik pada aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi keluarga. Dalam hal ini keberadaan Kampung KB di Kelurahan Dadapsari telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan pemerintah dan juga elemen-elemen masyarakat menjadi faktor pendorong yang sangat penting bagi berlangsungnya program Kampung KB di Kelurahan Dadapsari. Pemerintah melalui dukungannya secara formil dan juga elemen-elemen masyarakat yang secara praktis bahu membahu demi keberlangsungan program Kampung KB ini. Sementara itu faktor penghambat pelaksanaan program kampung KB di Kelurahan Dadapsari meliputi dua faktor utama yakni kesadaran masyarakat yang rendah, serta kurangnya tenaga penyuluh yang membuat pelaksanaan program kampung KB di Kelurahan Dadapsari berjalan kurang maksimal. Kedua, Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) Di Desa Telaga Waru Kec. Peringgabaya Kab.Lombok

Timur Tahun 2020 (Saipudin, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keluarga berencana di desa Telaga Waru variabel komunikasi, PLKB sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengikuti aturan Undang-undang No.52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana dan untuk komunikasiya sendiri pemerintah dan PLKB sudah mensosialisasikan program keluarga berencana ke masyarakat desa Telaga Waru ke setiap dusun masing-masing secara langsung dengan sangat baik kepada masyarakat. Selanjutnya untuk variabel sumber daya pemerintah kabupaten Lombok Timur sudah menggelontorkan dana untuk menunjang program KB. Walaupun masih kurang memadai dalam pelaksanaannya SDM yang tersedia sudah memenuhi klasifikasi dan sudah mahir dalam melaksanakan program KB. Sedangkan faktor pendukung adalah semangat dari petugas dan kader dalam melaksanakan program KB dan masyarakat ikut berpartisipasi. Faktor penghambatnya adalah kurangnya anggaran dan fasilitas sebagai sarana penunjang program KB di desa Telaga Waru. Ketiga, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dandin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur (I Gede Dodie Permana Putra). Hasil penelitiannya adalah secara pemahaman, Pelaksana Implementasi, mengetahui secara umum mengenai Keluarga Berencana ini. Namun dalam pelaksanaannya, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana masih belum optimal dalam hal pendanaan, belum terakomodasinya honor kader dalam anggaran desa, kualitas sumber daya manusia, sikap pelaksana yang belum optimal karena kualitas dan kuantitas dalam memberi informasi mengenai program masih menjadi pertanyaan, dan ketakutan pasangan usia subur dalam ber-KB. Sedangkan sikap PLKB yang seharusnya lebih aktif dalam promosi, konseling, informasi dan edukasi program keluarga berencana ini, bukan hanya sekedar kegiatan posyandu dan BKB. Hambatan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Dandin Puri Kelod adalah dari segi informasi dan dukungan pelaksana. Informasi yang dimaksud yaitu kurang lengkapnya informasi mengenai efek samping, bagaimana memelihara alat kontrasepsi dan pendekatan dari segi agama untuk jenis kontrasepsi yang akan digunakan. Dukungan pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurangnya pendanaan untuk honorarium kader KB dalam anggaran yang dimiliki Desa. Keberhasilan keluarga berencana ini juga menjadi alternatif untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Salah satu Desa yang menjadi kampung KB adalah Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Desa Grogol mempunyai wilayah seluas 412,809 Ha dengan jumlah penduduk ± 6.409 jiwa dan Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 1.129 jiwa. Mayoritas pekerjaan warga Desa Grogol adalah sebagai buruh pabrik dan petani. Gambar 1. Statistik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Rentang Usia Laki-laki Perempuan 0 - 4 72 69 5 - 9 68 51 10 - 14 182 196 15 - 19 193 281 20 - 24 281 239 25 - 29 187 216 30 - 34 219 304 35 - 39 224 216 40 - 44 217 210 45 - 49 282 306 50 - 54 217 320 55 - 59 279 387 60 - 64 568 625 Sejak adanya Kampung KB memberikan dampak yang baik pada desa mulai dari kesehatan masyarakat yang terjamin karena ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas hidup masyarakat juga memiliki peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya serta yang paling penting adalah fungsi Keluarga Berencana disini dapat terlaksana sebagai mestinya. Terbinanya pasangan usia subur paritas rendah (pusmupar) dan ibu paska melahirkan, semua Ibu hamil dan menyusui terlayani kesehatan KB, semua keluarga dengan anak usia 0-6 tahun terlayani BKB. Berdasarkan hasil observasi di lapangan terdapat beberapa masalah dalam implementasi program kampung KB diantaranya adalah:

1) masalah terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu masih kurangnya kepedulian masyarakat dengan adanya program Kampung KB (Keluarga Berencana) yaitu dengan 2 anak cukup. 2) kurangnya pembinaan terhadap kader, sehingga dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat masih ada masyarakat yang belum mengerti apa yang disampaikan oleh kader Kampung Berencana desa Grogol.

METODE Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat diolah dan dideskripsikan. Metode kualitatif ini menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder (Darmalaksana, 2020). Data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari observasi dan wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam proses implementasi program Kampung KB yaitu Ketua Kampung KB sebagai narasumber informasi dan anggota sebagai narasumber terkait data-data di Kampung KB desa Grogol. Sedangkan buku, jurnal, web resmi serta dokumen lain terkait Kampung KB desa Grogol merupakan sumber data sekunder yang didapat peneliti. Hasil wawancara dan observasi dapat diuraikan dan dijelaskan secara jelas apabila menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini didasarkan pada model implementasi kebijakan dan teori George C. Edward Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu 1) Komunikasil 2) Sumberdaya; 3) Disposisi; 4) Struktur Birokrasi. Empat variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Edward III adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi, maka pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilakukan, harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan tahu penyebab kegagalan dalam kebijakan. Data kemudian dibahas dengan mengadaptasi model Miles dan Huberman agar bisa ditarik kesimpulan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor- faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap Komunikasi Menurut George Edward III (Widodo, 2010:97) komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi yang dibina di Kampung KB Desa Grogol adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah Desa Grogol yang dibantu oleh kader Kampung KB memberikan arahan dan sosialisasi kepada para masyarakat dalam mengimplementasikan Kampung KB dengan berbagai program yang telah dicanangkan. 2) Kader Kampung KB desa Grogol memberikan arahan kepada semua masyarakat agar mengikuti

Kampung KB dan menerangkan tentang manfaatnya; 3) Ketua Kampung KB memberikan informasi yang tepat, akurat dan konsisten kepada pelaksana supaya dapat memahami kebijakan yang akan diimplementasikan; Gambar 2. Kegiatan Kampung Keluarga Berencana Desa Grogol Sumber daya Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya terkait dengan kegunaan (usefulness), baik untuk masa kini maupun mendatang bagi umat manusia. Selain dua kriteria di atas, definisi sumber daya juga terkait pada dua aspek, yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan, dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan. Sumber daya memiliki tiga sub indikator dalamnya yang digunakan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana, diantaranya yaitu: Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan juga sumber daya fasilitas. Adapun indikator sumber daya adalah sebagai berikut: 1) Tersedianya staf yang berkompeten dalam mengimplementasikan kebijakan; 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimplementasikan program Kampung KB; 3) Tersedianya anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan; 4) Tersedianya waktu yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya manusia yang berkaitan dengan program Kampung KB di desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: Tabel 1. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Kampung KB Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 No. Jabatan dalam Kelompok Kerja Nama 1. Pembina Camat Tulangan Didik Widoyoko 2. Ketua Oky Aspui Pribadi 3. Sekretaris Halimatus Sa'diyah, S.Sos 4. Bendahara Khilmiatur Rokhilah 5. Kelompok Kegiatan Seksi Keagamaan H. Mukhromin Seksi Sosial Budaya Fitri Virdausi Seksi Cinta Kasih Nur Pujiyanti Seksi Perlindungan Faridah Seksi Reproduksi Sumarni Seksi Sosialisasi Seniwati Seksi Ekonomi Astutik Ningsih Seksi Lingkungan M. Suhartono Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada sejumlah informan baik dari unsur pemerintahan maupun unsur masyarakat dalam indikator mekanisme penganggaran dan kecukupan anggaran program Kampung KB di desa Grogol, dilakukan dengan dua cara yaitu top down dan bottom up. Anggaran yang sudah disiapkan setiap tahunnya melalui program kegiatan yang disusun dari atas (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten), serta anggaran yang diajukan dari bawah yang dimulai dari penyusunan jenis-jenis kegiatan dan kebutuhan anggarannya dari pengurus Kampung KB yang kemudian diajukan dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya diajukan ke Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten. Sumber anggaran Program Kampung KB berasal dari BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi, APBD Kabupaten, dan juga dari ADD. Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa anggaran tersebut pada tingkat Kampung KB belum cukup memadai untuk dapat melaksanakan keseluruhan agenda kegiatan yang sudah disusun dan ditetapkan, sehingga dibuat langkah kebijakan dengan cara skala prioritas. Berikut anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk program Kampung KB di desa Grogol kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Tabel 2. Rancangan Anggaran Biaya Kampung KB desa Grogol No. Program Kegiatan Sasaran Biaya Keterangan 1. Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kualitas Masyarakat SK Kepala Desa Grogol ? Jumlah kelompok kerja tim Pokja 25 orang ? Sasaran kelompok kerja Kadus Desa Grogol ? Jumlah Sasaran binaan RT dan RW 600.000.000 ? operasional kelompok kerja Pokja 25 orang 2.500.000.000 ? JUMLAH 3.100.000.000 Pada dimensi sumber-sumber kebijakan, indikator ketiga adalah tentang ketersediaan dan kecukupan fasilitas, untuk menggali informasi sedalam-dalamnya bagaimana ketersediaan dan kecukupan fasilitas/sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan Program Kampung KB di desa Grogol.

Disposisi atau sikap pelaksana Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Edward III mengatakan bahwa: "Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut". Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa respon yang diberikan oleh para implementor yaitu PLKB dan juga kader didalam kegiatan Kampung KB di desa Grogol bahwa dari pihak implementor sendiri menerima sangat baik dengan adanya program Kampung KB ini, menurut beliau dengan adanya Kampung KB ini nantinya akan mensejahterakan masyarakat, dan jika program ini berhasil maka hal tersebut juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program Kampung KB ini. Menurut masyarakat para petugas sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya menjalankan program Kampung KB. Mereka sangat memahami program tersebut dan apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga mengerti kebutuhan masyarakat dan juga rajin melakukan kegiatan penyuluhan serta bersosialisasi dengan masyarakat. Intensitas petugas dalam melaksanakan kegiatan akhir-akhir ini terhambat dikarenakan covid-19 sehingga masyarakat Kampung KB yang ikut dalam melaksanakan suatu kegiatan ini dibatasi hanya ada beberapa orang saja yang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Struktur birokrasi Sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana/kader kampung KB mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan pengimplementasian kebijakan tersebut tidak akan dapat terlaksana atau terealisasi dengan baik. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya implementasi kebijakan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Kampung KB di desa Grogol harus ada hal-hal sebagai berikut: a) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam mengimplementasikan kebijakan Program Kampung KB desa Grogol; b) Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan Program Kampung KB desa Grogol. Gambar 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Grogol Dalam pelaksanaan kerja digunakan SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu program. SOP (Standard Operational Procedures) digunakan sebagai acuan langkah-langkah atau tahapan dari tindakan yang akan diambil selama proses pelaksanaan dari suatu kegiatan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, SOP dari Kampung KB di Desa Grogol sudah cukup baik, SOP yang digunakan yaitu berupa buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung KB, mulai dari awal kegiatan hingga tahap akhir yaitu laporan dan juga evaluasi program semua mengikuti buku petunjuk teknis tersebut. PENUTUP Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Standar dan sasaran kebijakan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan Pelaksanaan Kampung KB sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya SOP (Standard Operational Procedures) berupa buku petunjuk teknis Kampung KB serta pemahaman implementor terhadap standar dan sasaran kebijakan itu sendiri, (2) sumber daya manusia dan anggaran dalam Pelaksanaan Kampung KB sudah memadai, namun dari segi fasilitas belum memadai dikarenakan fasilitasnya belum ada hanya ada pembinaan yang dilakukan kepada implementor, (3) karakteristik Agen pelaksana struktur birokrasi pembagian dan wewenang serta

karakter petugas Kampung KB dalam pelaksanaannya sudah cukup jelas dan baik hal ini dapat dilihat dari struktur birokrasinya yang jelas dan tugasnya yang memiliki karakteristik agen pelaksana sebuah kebijakan yang baik, (4) Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana Respon dan pemahaman implemendor akan program Kampung KB cukup baik hal ini terlihat dari keinginan implemendor untuk melakukan program KB ini dengan baik. Insentif implemendor yang diberikan pun juga dapat dikatakan cukup. Ucapan Terimakasih Penelitian ini dapat berjalan dengan baik karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Grogol, Kepala Kampung KB dan jajaran stafnya yang memberikan kerjasama yang baik dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. FISIP UI PRESS.

A.G, Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Erlangga

Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Prilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press

Gorontalo Martono, Nanang. 2012. Sosiologi Perubahan Sosial Prespektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Offset Nasiwan. Wahyuni, YS. 2016. Seri Teori – Teori Sosial Indonesia. Yogyakarta: UNY Press

Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman Bagi Pengelola Kampung KB Di Lini Lapangan Riant, Nugroho, Dwijowijoto. 2003. Kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suparno. 2017. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang). Semarang: Dwiputra Pustaka

Jaya Indrian, Ika. Sambiran, Sarah. Kumayas, Neni. 2018. Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Volome 1 No.1: 8 - 11

Mardiyono. 2017. Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK dan Terkait di Jawa Timur. (Studi di Kabupaten Bondowoso dan Bangkalan). Vol 2 No.1: 4

Restiyan, NLN. Yasa, IGWM. 2019. Efektifitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Denpasar. 8.7: 712-715.

Peraturan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN. (2017). UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2 tentang Kesejahteraan Sosial.